

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ikatan Akuntansi Indonesia Paragraf 3 menyebutkan Pengertian laporan keuangan dalam standar Akuntansi Keuangan adalah suatu laporan terstruktur dan memiliki persyaratan minimal isi yang menyajikan posisi keuangan serta kinerja keuangan dalam entitas. Laporan keuangan menyajikan kondisi finansial suatu perusahaan dalam periode tertentu. Informasi mengenai kondisi finansial tersebut dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan seperti manajemen, pemberi pinjaman, investor, hingga pemegang saham untuk menilai kinerja perusahaan dan menentukan langkah-langkah yang dapat diambil setelahnya. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumberdaya yang dipercayakan kepada mereka (Ramanda, 2018).

Laporan keuangan terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan. Laporan Keuangan berguna untuk memberikan informasi posisi keuangan yang akurat, kinerja, perubahan posisi keuangan bagi perusahaan, instansi dan lembaga dalam periode tertentu, serta membantu manajemen dalam mengambil keputusan yang berguna untuk memenuhi kebutuhan informasi tertentu.

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah menyebutkan, pengguna laporan keuangan adalah masyarakat, para wakil rakyat, lembaga pengawas dan lembaga pemeriksa, pihak yang memberi atau berperan dalam donnasi, investasi dan pinjaman, serta pemerintah. Laporan keuangan pemerintah disiapkan dan disajikan untuk memberikan transparansi dan pertanggungjawaban kepada masyarakat mengenai bagaimana uang pembayaran pajak dikelola dan dibelanjakan. Laporan-laporan ini disusun secara berkala seperti tahunan atau triwulan, dan diwajibkan untuk mematuhi akuntansi tertentu dan dasar pelaporan. Pajak, donasi atau sumbangan, utang, laba perusahaan negara atau

daerah, dan sumber daya lainnya biasanya sumber dana yang diperoleh dari pemerintah, Pemerintah sebagai manajemen yang mengelola keuangan negara memiliki tugas khusus dan dituntut untuk mempertanggungjawabkan penggunaan sumber-sumber dana tersebut kepada masyarakat selaku pembayar pajak, donator, kreditur, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. (Rusmana, et al. (2017;20). Pemerintah berupaya untuk menetapkan standar akuntansi pemerintah yang telah ditetapkan oleh presiden melalui Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah. Akuntansi mencakup konseptual, standar, metode prosedur, dan teknik dalam melaporkan suatu keadaan keuangan yang biasa disebut dengan laporan keuangan.

Tolak ukur pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara adalah standar pemeriksaan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004. Untuk melakukan memeriksa atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dibentuklah suatu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 E. Untuk menunjang tugas Badan Pemeriksa Keuangan didukung dengan seperangkat Undang-Undang di bagian keuangan negara yaitu: Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

(UUD 1945 Pasal 23E Ayat 1) Badan pemeriksa keuangan merupakan suatu lembaga bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara. Badan pemeriksa keuangan ada tiga jenis pemeriksaan yakni pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Tugas dan wewenang Badan Pemeriksa Keuangan disusun dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan BAB III mengenai tugas dan wewenang. Penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan terbatas pada Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, badan usaha milik negara, pelayanan publik, perusahaan daerah, dan semua lembaga lain yang berwenang. mengelola keuangan negara tugas Badan Pemeriksa Keuangan

sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 pada bagian pertama.

Pemeriksaan keuangan merupakan pemeriksaan terhadap laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menyatakan pendapat mengenai tingkat kewajaran informasi yang terkandung dalam laporan keuangan pemerintah. Pemantauan kinerja merupakan pemeriksaan yang didasarkan pada aspek ekonomi, efisiensi dan efektivitas. Audit dengan tujuan tertentu merupakan audit yang bukan merupakan audit keuangan dan audit kinerja. Seluruh hasil pemeriksaan BPK RI disampaikan kepada DPR/DPD/ DPRD untuk kemudian ditindaklanjuti sesuai kewenangannya.

Laporan keuangan yang telah disusun akan disajikan kepada berbagai pemangku kepentingan, termasuk lembaga legislatif, pemerintah, masyarakat umum, dan lembaga pengawas. Penyajian dilakukan dengan memperhatikan format yang jelas dan informatif, serta memastikan isi laporan mencakup informasi yang relevan dan transparan. Selain itu, BPK RI juga melaksanakan pemeriksaan internal terhadap laporan keuangannya sendiri, yang mencakup berbagai jenis pemeriksaan seperti pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Hasil dari pemeriksaan tersebut kemudian disampaikan kepada lembaga legislatif untuk ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, sehingga memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara oleh BPK RI.

Judul Penelitian Mekanisme Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) merujuk pada proses yang terlibat dalam penyusunan serta penyajian laporan keuangan oleh lembaga tersebut. Proses tersebut dimulai dengan pengumpulan data dan informasi terkait keuangan BPK RI, yang meliputi pendapatan, pengeluaran, serta aset dan kewajiban lainnya. Setelah itu, data tersebut dianalisis secara menyeluruh untuk memastikan keakuratan dan kepatuhan terhadap standar akuntansi yang berlaku. Berbagai laporan keuangan seperti, laporan perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan, dan laporan arus kas kemudian disusun berdasarkan hasil analisis tersebut. Persyaratan dan pedoman yang diberlakukan oleh pemerintah pun harus dipatuhi dalam proses penyusunan tersebut

untuk memastikan kualitas dan keandalan laporan keuangan yang dihasilkan oleh BPK RI.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka saya merumuskan masalah yaitu;

1. Bagaimana mekanisme penyusunan laporan keuangan pada Badan Pemeriksa Keuangan Kantor Perwakilan Sumatera Barat?
2. Bagaimana mekanisme penyajian laporan keuangan pada Badan Pemeriksa Keuangan Kantor Perwakilan Sumatera Barat?

1.3 Tujuan Penulisan

1. Tujuan penulisan ini Untuk mengetahui bagaimana mekanisme penyusunan laporan keuangan pada Badan Pemeriksa Keuangan Kantor Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
2. Tujuan penulisan ini Untuk mengetahui bagaimana mekanisme penyajian laporan keuangan pada Badan Pemeriksa Keuangan Kantor Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.

1.4 Metode Pengumpulan Data

1. Metode Observasi

Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan data langsung di lokasi magang yaitu Badan Pemeriksa Keuangan perwakilan Sumatera Barat

2. Studi Perpustakaan

Mengumpulkan data dan informasi yang sesuai dengan topik atau rumusan masalah yang sedang diteliti dengan referensi meliputi buku – buku ilmiah, jurnal dan sumber sumber tertulis baik cetak maupun internet.

3. Wawancara

Teknik ini dilakukan untuk mendapatkan informasi dan data secara lisan dan bertatap muka yang dilakukan secara langsung dengan beberapa pegawai tetap yang dijadikan sampel dalam penulisan ini.

1.5 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika Penulisan dalam pembuatan proposal magang adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian pendahuluan memuat uraian yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, metode penelitian dan sistematika penulisan. Apa yang dipaparkan dalam pendahuluan hendaknya dapat mengantar pembaca pada isi pokok (substansi) Tugas Akhir.

BAB II LANDASAN TEORI

Berisikan tentang landasan teori yang dipakai dalam penulisan mengenai laporan keuangan, Pengertian Laporan Keuangan, Tujuan dan Laporan Keuangan, Peranan Laporan Keuangan, Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Komponen Laporan Keuangan, Standar Akuntansi Pemerintahan, Pengertian Akuntansi Pemerintahan, Lingkungan Akuntansi Pemerintahan.

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Berisikan tentang gambaran Badan Pemeriksaan Keuangan, seperti sejarah BPK, visi dan misi, uraian tugas, struktur organisasi BPK, makna logo BPK serta bentuk kegiatan dalam BPK.

BAB IV PEMBAHASAN

Berisikan tentang hasil studi lapangan Badan Pemeriksaan Keuangan mengenai bagaimana Mekanisme Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Badan Pemeriksaan Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Berisikan Kesimpulan dari hasil pembahasan dan pelaksanaan magang serta saran yang berguna sebagai bahan pertimbangan dan perbaikan untuk masa yang akan datang.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Laporan Keuangan

2.1.1 Pengertian Laporan Keuangan

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) pada pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.1 (revisi 2009) menyatakan bahwa suatu perusahaan diwajibkan untuk membuat laporan keuangan yang terdiri atas neraca, laporan laba rugi, laporan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Terdapat juga pada PSAK NO.1 tahun 2015 bahwa laporan keuangan merupakan penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja entitas.

(Badan Pemeriksa Keuangan , 2022) Laporan keuangan pada BPK terdiri dari seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh BPK. Serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran hingga laporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada kementerian negara/lembaga merupakan laporan keuangan yang dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI).

Pengertian Laporan keuangan Menurut para ahli;

- a. Menurut Raymond Budiman (2021) Laporan keuangan merupakan dokumen yang menggambarkan posisi keuangan dan kinerja perusahaan selama periode waktu tertentu.
- b. Menurut Kasmir (2019) Laporan keuangan merupakan laporan yang memperlihatkan posisi keuangan suatu entitas pada periode itu atau untuk waktu tertentu.
- c. Menurut Werner R. Murhadi (2019) laporan keuangan merupakan bentuk bahasa bisnis. Laporan keuangan memberikan data yang terolah kepada pengguna tentang posisi keuangan perusahaan. Memahami laporan keuangan perusahaan memungkinkan pemangku kepentingan yang berbeda untuk memahami posisi keuangan perusahaan.